



Jurnal BADATI

Vol 6 No 2 November 2024

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 1-15

ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SORONG

Arce Yulita Ferdinandus¹, Susana Magdalena Muskita², Ratna Rosmauli Pakpahan³

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Victory Sorong
Email: arceferdinandus@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Victory Sorong
Email : muskitasusan@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Victory Sorong
Email: ratnarosmauli@gmail.com

Abstract

Regency General Election Commission's strategy so far has been to use a communication approach and has not yet made people understand who they are voting for and what the importance of using their right to vote is, considering that many people still put aside general elections, because they consider them to be less important to them. So the problem in the research is the General Election Commission's strategy in an effort to increase community participation in Regency? The type of approach used in this research is a qualitative approach. The research data used includes primary and secondary data obtained through interviews and document studies. Data was analyzed qualitatively. The location of the research was on Sorong City. The research results show that the strategy that needs to be carried out by the Sorong City KPU is an agenda setting strategy, which has 2 levels, namely; (1) The first level of agenda setting is an effort to develop general issues that are considered important. (2) The second level of agenda setting is determining the parts or aspects of the general issue that are considered important. So there is a need for a media agenda by socializing through the media to influence the public agenda.

Keywords: Strategy, Participation, Agenda Setting

Abstrak

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong selama ini menggunakan pendekatan komunikasi masih belum membuat masyarakat memahami siapa yang dipilih dan apa pentingnya menggunakan hak pilih, mengingat masih banyak masyarakat mengesampingkan pemilihan umum, karena dianggap kurang begitu penting bagi mereka. Maka permasalahan dalam penelitian adalah strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Sorong?. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Sorong. Hasil penelitian menunjukkan Strategi yang perlu dilakukan oleh KPU Kota Sorong adalah strategi agenda setting, dimana memiliki 2 level yaitu; (1) Agenda setting level pertama adalah upaya membangun isu umum yang dinilai penting. (2) Agenda setting level kedua adalah menentukan bagian-bagian atau aspek-aspek dari isu umum tersebut yang dinilai penting. Sehingga perlu adanya agenda media dengan bersosialisasi melalui media untuk mempengaruhi agenda publik.

Kata Kunci : Strategi, Partisipasi, Agenda Setting

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara penganut paham demokrasi yang selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, pelaksanaan kedaulatan rakyat bisa di identikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Ini memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Gelombang demokrasi yang melanda hampir setiap negara dibelahan bumi termasuk di Indonesia telah membawa

perubahan dalam tatanan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengertian demokrasi secara sederhana menurut Joseph Schumpeter adalah demokrasi merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin karena salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hak pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemberian suara dalam pemilu (voting) merupakan bentuk partisipasi terendah dalam politik setelah menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif, keanggotaan aktif sebuah suatu organisasi publik, keanggotaan pasif sebuah organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, partisipasi dalam rapat umum dan demonstrasi, partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik (Rush dan Althop : 2000). Namun pemberian suara dalam suatu pemilu atau pilkada memberi peran penting bagi tercapainya output pemilu yang baik.

Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli di atas, dimana demokrasi berarti warga Negara diberikan kesempatan untuk memilih calon - calon pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat. Pemilu menandai adanya keterlibatan rakyat secara aktif dalam menentukan arah pemerintahan melalui wakil - wakil rakyat di daerah selama satu periode pemerintahan. Oleh sebab, itu pemilihan kepala daerah merupakan hal yang penting untuk terpilihnya kepala daerah yang sesuai dengan pilihan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat di butuhkan pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil serta sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal di Indonesia”. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota atau berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Secara umum dapat di gambarkan peran Komisi Pemilihan Umum yakni mengadakan sosialisasi, fungsionalisasi institusi pemerintahan secara proporsional, mampu membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong selama ini masih belum membuat masyarakat memahami siapa yang dipilih dan apa pentingnya menggunakan hak pilih, mengingat masih banyak masyarakat yang mengesampingkan pemilihan umum, karena dianggap kurang begitu penting bagi mereka. Maka dari itu untuk meningkatkan semangat partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pemilu pada Kota Sorong ada tiga macam tahapan kegiatan pemilu yang meliputi tahap persiapan pelaksanaan, dan penyelesaian, pelaksanaan, dan penyelesaian, tentu merupakan sebuah tugas yang amat rumit dan memerlukan banyak strategi dalam melaksanakan tata kerja program dan kegiatan dari ketiga tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat disetiap gelaran pemilihan umum, namun lewat penelitian ini penulis ingin menganalisa strategi yang harus diterapkan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis strategi yang diterapkan dalam meminimalisir kendala yang timbul ketika Pemilihan Umum sedang berjalan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
2. Untuk Menganalisis Strategi KPU Kota Sorong dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dalam menyikapi setiap strategi yang akan diterapkan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Sorong pada pemilihan umum. Didasarkan pada konsep teori dan ilmiah yang diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi publik sebagai bahan kajian, menambah wawasan, meningkatkan karakter individu yang lebih partisipatif, toleran dan tidak soliter tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan proses pembangunan dan politik.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampurkan ke dua kata tersebut. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Pengertian strategi juga terbagi atas dua bagian yaitu Umum dan Khusus: Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Secara khusus strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Pengertian strategi yang akan di kemukakan oleh para ahli mempunyai banyak kesamaan, yaitu mengenai konsep “tujuan jangka panjang”, suatu perumusan dalam menentukan pemecahan, masalah dan kebijakan umum yang dihadapi organisasi dalam menghadapi keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi serta penekanan pada “pola tujuan dan kerangka kerja”.

pengertian strategi. Seperti yang dijelaskan oleh Kuncoro (2005: 1-2) dalam buku yang berjudul “Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif” dijelaskan mengenai strategi menurut Itami, strategi merupakan penentuan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan. Sedangkan menurut Andrews, bahwa strategi merupakan pola sasaran, tujuan dan

kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.

Kuncoro sendiri mendefinisikan strategi adalah pemimpin bisnis perusahaan merealisasikan filosofinya. Selanjutnya bahwa strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada “pola tujuan dan kerangka kerja” menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menarik kembali. Berbeda dengan pendapat David (2006: 17) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi dapat mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khusus untuk lima tahun dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan menurut Milles dan Snow et.,al dalam Kuncoro (2005: 88-89) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam menggunakan strategi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan pesaingnya dapat melalui beberapa strategi diantaranya yaitu:

1. Strategi Prospektor (*Prospector*) yaitu strategi yang mengutamakan pada keberhasilan organisasi dalam berinovasi, selalu menciptakan produk baru dan kesempatan pasar yang baru.
2. Strategi bertahan (*Defender*) yaitu perusahaan dengan strategi bertahan biasanya mementingkan stabilitas pasar yang menjadi targetnya.
3. Strategi Penganalisis (*Analyzer*) yaitu merupakan strategi analisis dan imitasi. Organisasi yang menggunakan strategi ini akan menganalisis ide bisnis baru sebelum organisasi untuk memasuki bisnis tersebut .
4. Strategi reaktor yaitu organisasi yang bereaksi terhadap perubahan lingkungan dan membuat suatu perubahan hanya apabila terdapat tekanan dari lingkungannya yang memaksa organisasi tersebut untuk berubah.

Strategi organisasi berperan untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan umum yang dipakai organisasi untuk mencapai tujuan. Sehingga organisasi dalam mencapai tujuannya ada dua cara yaitu melalui pengelolaan yang lebih baik atas apa yang sedang dikerjakan sekarang dan melalui penemuan hal-hal yang baru (Gibson dkk. 1996). Konsep lain menjelaskan bahwa strategi organisasi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Salusu, 2003).

2. Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam salusu 2006: 101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhan disebut Master Strategy, yaitu enterprise strategy, corporate strategy, business strategy, dan functional strategy, Beberapa penulis lain seperti Wheelen dan Hunger (dalam salusu 2006: 101) mengenal tiga tingkatan strategi saja, yang di dalamnya corporate strategy sudah mencakup enterprise strategy.

a. Enterprise strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan

dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintahan dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntutan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategy interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

b. *Corporate strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digelut oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dilihat para penguasa, para anggota legislatif, Para donor, para politis. Dan sebagainya semua ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

d. *Functionall strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

1. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat.
2. Strategi fungsioanal manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning organizing implementing, controlling, staffing, leading, motivation, communicating, decision making, refresenting dan integrating.
3. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

Tipe-tipe strategi

Dalam mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe strategi, Koteen (dalam Salusu 2006: 104) sesungguhnya tidak berbeda pandangan Higgins, Wheelen dan Hunger, meskipun mereka yang disebut terakhir ini mengklarifikasikan strategi itu kedalam apa yang disebut tingkat-tingkat strategi. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Corporate strategy (strategi organisasi)*. Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.
2. *Program stratgy (strategi program)*. Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.
3. *Resource support strategy (strategi pendukung sumber daya)*. Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. *Institusional strategy (Strategi Kelembagaan)*. Fokus dari strategi instusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

2. Komisi Pemilihan Umum

a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Dalam undang-undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Ayat 7 pasal ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten//Kota adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umu merupakan suatu komisi negara yang beposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedangkan lembaga negara utama disebut pula *main state organ*. Dalam penyelenggaraan pemilu Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam melaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebelum pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No, 4 Tahun 2000 anggota Komisi Pemilihan Umum diharuskan non partisipan .

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sedangkan pengertian KPU menurut UU No 15/2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 angka 8 menyebutkan “ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota”. Untuk menyelenggarakan pemilu ditingkat kabupaten/kota, dibentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Masa keanggotaan KPU Kabupaten/Kota selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang yang terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai integritas, kompetensi dan kemampuan dalam melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugas KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan KPPS. Jumlah anggota PPK sebanyak 5 orang, PPS sebanyak 3 orang, dan KPPS sebanyak 11 orang yang terdiri dari kalangan profesional yang memiliki integritas, kompetensi dan mempunyai kemampuan dalam melakukan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan bukan anggota partai politik.

KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi lewat berbagai tahapan seleksi oleh Tim Seleksi KPU yang dibentuk dalam kalangan professional, akademisi dan masyarakat yang memiliki integritas. Sedangkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibu kota kecamatan, PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibentuk oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Pelaksanaan pemilu di tiap tingkat akan bertanggung jawab kepada lembaga yang membentuknya. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah lembaga yang berwenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, di setiap Provinsi, Kota/ Kabupaten. Tugas dan wewenang KPUD berdasarkan Undang-undang no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu pada paragraf 3 pasal 10 ayat (3). Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Bupati/ Walikota meliputi :

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak sudah berlakunya UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat pilkukada.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pilkukada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara

langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan, Di indonesia saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat.

Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut :

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu. Semua ini membawa kita pada persoalan pandangan bahwa pembangunan politik itu seharusnya sama dengan diciptanya lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi, Partisipasi rakyat dalam politik tentulah sangat dibutuhkan oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Pendidikan politik rakyat, menurut merupakan unsur yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena hal itu berguna untuk membutuhkan kesadaram, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat. Namun demikian, pada dataran praktis, upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan politik yang demokrasi tidak sedikit mengundang perdebatan, menyangkut strategi pengembangannya.

Pemilu menjadi indikator suatu negara berdemokrasi atau tidak, sebab sebuah negara yang memberikan keluasaan warganya untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau perwakilan di parlemen menandakan negara tersebut telah berupaya berdemokrasi. Oleh karena itu, demokrasi melalui kegiatan Pemilu mensyaratkan warga untuk ikut terlibat dalam memberikan suaranya. Tanpa adanya upaya melibatkan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas demokrasi.

Sebagian masyarakat masih meihat pemilu sebagai ajang pencapaian kekuasaan semata dan tak memberi manfaat untuk perbaikan kedepannya. Sebagian menilai para calon anggota legislatif suku mengambar janji yang tidak dipenuhi, akibatnya pada pelaksanaan pemilu, masyarakat kurang peduli kaena menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu dan tidak mempunyai manfaat. Masyarakat yang apatis berpandangan bahwa siapa pun yang bakal terpilih menjadi anggota legisltif tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap hidupnya. Selain itu ada kelompok yang berpandangan bahwan calon anggota legislatif itu-itu saja kalau calon itu terpilih, maka akan sama saja dengan sebelumnya, sebagian penyelenggara pemilu KPU memiliki peran dalam melakukan sosialisai kesemua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan masyarakat termarjinalkan. Makin tinggi tingkat partisipasi mengidifikasikan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kegenaraan.

Peserta pemilu pada pilkada serentak dapat meningkatkan angka prestasi pemilih pada saat pencoblosan. Meskipun dalam pelaksanaanya, banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalamnya, diantaranya yaitu partisipasi masyarakat yang selalu mengalami pasing surat, sudah dijelaskan bahwasahnya penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan umum nasional yang di ikuti penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah akan menjadi berita buruk bagi

partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang. Partisipasi politik dalam pemilu adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Michael Rush dan Philip Althof (2012: 100) mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
- e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demokrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik internal Partisipasi dalam pemungutan suara.

Dalam sistem perwakilan, keterlibatan warganegara harus dapat membantu meyakinkan bahwa aparat negara berikap responsif terhadap ketentuan dan tuntutan yang terdapat diantaranya sebagian besar warga negara, ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara yang telah dikembangkan yakni teori dan partisipatori:

1. Pendekatan elitis, menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu metode pembuatan keputusan yang mengokohkan efisiensi dalam administrasi dan pembuatan kebijaksanaan namun menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasa dan kaum elit terhadap pendapat umum.
2. Pendekatan partisipatori, keterlibatan yang lebih tinggi, karena sangat diperlukan untuk mendatangkan keuntungan seperti ini kita harus menegakkan kembali demokrasi langsung.

KPU dalam mendorong partisipasi masyarakat melakukan pemetaan program peningkatan partisipasi melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi informasi pemilu, Tujuannya untuk penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan dan mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilitas sosial, media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya memudahkan masyarakat dapat menerima informasi pemilihan dengan baik .
2. Pendidikan politik, Tujuan membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik dilakukan melalui mobilitas sosial, pemanfaatan penjangkaran sosial, media lokal, pembentukan relawan demokrasi pemilihan serta bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai.

Menurut Rusdi Kantaprawira (2004:55) pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Sedangkan Alfian (1992:235) mengemukakan pendapat berkaitan dengan pendidikan politik sebagai berikut, pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung pada suatu sistematis politik yang sangat ideal yang hendak di bangun. Dengan penjelasan di atas, yang di kemukakan oleh Alfian sama dengan sosialisasi politik ,yaitu menyebarkan atau menyampaikan program-program pemerintah

(penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem politik, Senada dengan Alfian, wahab (dalam komarudin 2005:19) mengemukakan, bahwa pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Peningkatan partisipasi

Pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan periode di luar pemilihan, pada periode pemilihan, pendidikan pemilih, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Pada periode di luar pemilu, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan.

5. Peningkatan literasi politik

Pendidikan pemilih ditujukan untuk meningkatkan kemampuan literasi politik pemilih, Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan dalam literasi politik dibutuhkan sebagai syarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilihan dan di luar periode pemilihan. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah politik.

Adapun tujuan utama sistem perwakilan dalam negara adalah menyediakan sarana bagi para warga negara terbiasa melakukan kontrol tertentu terhadap pembuatan keputusan politik pada saat mereka tidak dapat secara langsung membuat keputusan itu sendiri, hal ini di dasari pemikiran para wakil rakyat tidak dapat mengabdikan seumur hidupnya, maka diciptakanya sarana lain berupa sistem pemilihan yang dapat dilakukan dengan periodik, sistem pemilihan merupakan salah satu ciri utama sistem demokrasi.

Dominasi mayoritas umumnya dianggap sebagai ciri utama dan paling penting dari sistem pemilihan, terhadap keinginan masyarakat. Dominasi mayoritas menimbulkan banyak persepsi, yang dapat di kualifisir, dominasi mutlak atau dominasi relatif.

Menurut Rahman (2007:288), tripologi partisipasi politik yaitu :

1. Partisipasi Aktif, partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output, Artinya setiap warga negara secara aktif mengusulkan mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk, membenarkan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain lain.
2. Partisipasi pasif, partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (Golput) Serangkai apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang diinginkan.

Menurut Rahman (2007:289) model partisipasi politik terbagi dalam empat bagian yaitu :

1. Partisipasi Aktif, jika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
2. Partisipasi pasif (Apatis), sebaiknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif.
3. Militan (Radikal), kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan.

Keikutsertaan masyarakat dalam konstelasi pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat, Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Maka dari upaya untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat harus terus dilakukan termasuk di dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan undang-undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin kegiatan pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi suatu masyarakat untuk mendorong terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan local di Indonesia”. Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sarana jangka panjang, penggunaan serangkaian peristiwa serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam salusu 2015:64) berargumen terdapat tiga indikator stratego, yaitu Formulasi dan target jangka panjang, yang ditandai dengan perencanaan yang mempertimbangkan bebrapa aspek yang penting berkaitan dengan kondisi daerah sekitar.

Pemilihan tindakan, ditandai dengan pencapaian visi dan misi serta tujuan suatu organisasi dan sumber daya yang ditandai dengan mendukung terwujudnya suatu kegiatan. Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Penigkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan Sosialisasi informasi pemilu, melalui dengan media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya melalui dengan media massa, pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya, Pendidikan politik, melalui penjaringan sosial, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan.

METODE

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Motode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang

jelas kebenaran dan kegunaannya. Meliputi beberapa strategi penelitian secara kualitatif interaktif dan informan dari hasil wawancara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pilkada Provinsi Kota Sorong yaitu 440.826. tingkat partisipasi masyarakat memilih sebanyak 91 persen, tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat di Papua Barat Daya. Jumlah DPT perempuan sangat tinggi dibandingkan dengan DPT laki-laki. Yang tersebar di Kota Namun pada jumlah TPS ada masyarakat yang tidak memilih atau golput Ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum punya kesadaran dalam proses pemilihan umum. Terdapat kepedulian dari masyarakat yang lebih besar sehingga kecepatan suara rakyat daerah sangat peduli terhadap pemilihan pemimpin – pemimpin bangsa. Didalam Sistem dalam suatu institusi pemerintah sangatlah penting, karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar. Suatu sistem dapat berjalan diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud.

1. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada di Kota Sorong

a. Sosialisasi

Menurut narasumber mengatakan bahwa sosialisasi pada umumnya digunakan pada ahli-ahli ilmu sosial untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak atau generasi lebih muda diperkenalkan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka jalankan kelak jika sudah dewasa.” Sedangkan sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik yang mana menurut Joko J Prihatmoko yaitu membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik serta partisipasi politik rakyat.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada dalam petikan wawancara sebagai berikut: Pilkada ini adalah salah satu momentum paling penting, pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah kota yang hanya ada 5 Tahun sekali. PPK dan PPS melakukan Komvoi untuk mengingatkan masyarakat untuk hadir memilih, Sehingga kami berharap agar seluruh warga masyarakat ini dapat berpesta dengan cara menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan, sebab 5 menit di bilik suara menentukan nasib Daerah hingga 5 tahun kedepan. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilih, sebab bagi pemilih yang disabilitas, boleh dibantu oleh keluarga ataupun petugas KPPS sedangkan bagi mereka yang sakit dan tidak dapat mendatangi TPS, KPU tetap memberi kesempatan yaitu dengan cara petugas KPPS beserta saksi dapat membawakan surat suara di rumah mereka, tentunya dengan pengawasan dan pengawalan PTPS dan Tim keamanan.

Sosialisasi merupakan salah satu tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Sorong dapat memberikan hak masyarakat akan informasi Pilkada, sosialisasi bertujuan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Dalam melakukan sosialisasi tatap muka KPU Kota Sorong serta anggotanya terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, juga mengadakan kegiatan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada seperti launching mascot Komisi Pemilihan Umum di Hotel Aston, Sosialisasi KPU Papua Barat Daya Kepada Masyarakat

Khususnya Kaum Perempuan Dan Distabilitas (Tuna Netra dan Tuna Rungu) monitoring KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Rekrutmen peserta/pendaftaran KPPS tingkat Distrik di Kabupaten Sorong, dalam kegiatan tersebut juga memberikan informasi mengenai Pilkada serta menyampaikan visi dan misi tiap calon. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong dengan tujuan untuk menyampaikan informasi terkait tahapan penyelenggaraan kepada khalayak yang menjadi sasaran sosialisasi. Sasaran komunikasi saat melaksanakan sosialisasi yaitu semua elemen masyarakat, mulai dari basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih marginal, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis komunitas, basis keagamaan, bahkan juga memperkenalkan Politik kepada anak-anak. Komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi yaitu mengintegrasikan sikap, berbagai strategi tersebut yaitu, publikasi media, komunikasi tatap muka dan mobilisasi sosial yang tidak hanya melibatkan KPU dan Relawan Demokrasi tapi juga seluruh stakeholder serta menjangkau semua masyarakat. Peran pemerintah dalam peningkatan pemilih dalam suatu pemilu cukup besar pemerintah dan stakeholder dalam meningkatkan partisipasi pemilih saling bekerjasama mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Masyarakat yang berada di kecamatan atau desa dengan adanya stakeholder membuat pemahaman akan pemilu akan lebih besar. Selain itu, dengan adanya stakeholder turut membantu masyarakat dalam proses pengenalan pemilu dan siapa saja yang akan dipilih.

Faktor-faktor diatas menjadi kesatuan yang mempengaruhi peningkatan partisipasi. Kesadaran masyarakat, sosialisasi dan pendidikan pemilih, peran peserta pemilu dan peran pemerintah dan stakeholder menjadi faktor yang saling berhubungan agar pelaksanaan dalam peningkatan partisipasi pemilih lebih maksimal. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah output partisipasi pemilih dalam pemilu.

Adapun harapan KPU Kota Sorong sebagai penyelenggara yang diungkapkan oleh anggota divisi perencanaan dan data, dalam petikan wawancara sebagai berikut: Seluruh yang terdaftar di DPT kita harapkan semua hadir untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan kalau ada yang tercecer, tidak terdaftar masih kita berikan ruang untuk memilih, yang penting masih warga disini. Kalau ada yang tidak datang memilih itu faktor individu masing-masing, jadi tidak ada sama sekali dihalangi untuk memilih.

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa golput merupakan hak setiap orang untuk berpartisipasi dan memiliki alasan tersendiri untuk memilih golput, masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pilkada karena faktor pekerjaan dan pemilih yang berada di luar kota menjadi pertimbangan yang sangat sulit untuk ditinggalkan mengingat pekerjaan yang sedang dijalannya menuntut agar mereka tetap hadir meskipun ada pesta demokrasi yang berlangsung. Berbagai upaya yang dilakukan KPU agar masyarakat ikut serta dalam pesta demokrasi tetapi kembali lagi kepada masyarakat apakah ingin menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Hasil wawancara selanjutnya telah dilakukan oleh peneliti kepada anggota divisi teknis dalam wawancara sebagai berikut: Kita gunakan semua media dalam sosialisasi, seperti iklan di media cetak, media sosial, radio tujuannya itu bahwa kita mau gemahkan kepemiluan ini di masyarakat. Kemudian Strategi lainnya seperti komunikasi dalam membentuk Relawan Demokrasi yang kita gaji tiap bulannya oleh KPU. Tujuannya yaitu membangun komunikasi di masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat serta membangun meningkatkan kerjasama dengan stakeholder seperti OKP, Ormas, komunitas, PPK dan PPS dengan stakeholder yang lain.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Kota Sorong melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 basis pemilih yaitu: basis pemilih pemula, basis pemilih muda,

basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih penyandang disabilitas dan basis komunitas.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya Relawan Demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pilkada dapat berjalan dengan baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya. Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas proses Pemilu
- b. Meningkatkan partisipasi pemilih
- c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
- d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kasubbag Hukum Dan SDM dalam wawancara sebagai berikut: Kita datang secara khusus pemilih disabilitas, kita melakukan pendekatan karena jangan sampai mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena kekurangannya karena dia merasa momentum pesta demokrasi ini hanya untuk orang-orang yang sempurna, orang-orang yang hebat padahal tidak, semua memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggara pemilu benar-benar sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus mensosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kota dalam menggunakan hak pilih, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Tambauw menggunakan hak pilih pada setiap organisasi memiliki strategi yang dilakukan untuk mempengaruhi setiap informan agar organisasi tersebut berhasil dilirik. Sehingga perlu adanya agenda media yang dilakukan untuk mempengaruhi agenda publik. Seperti yang dilakukan organisasi KPU untuk mempengaruhi informan agar partisipasi pemilihnya bisa meningkat. Partisipasi yang dimaksud adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat pemilihan. Adapun teori yang digunakan terkait upaya yang dilakukan terhadap peningkatan partisipasi pemilih menggunakan teori agenda setting. Untuk itu dalam penentuan strategi dengan pengaruh media yang tepat maka teori agenda setting yang tepat menjadi pisau analisis. Teori agenda setting yang terdapat dua level yang harus dipenuhi.

- b. Agenda setting level pertama adalah upaya membangun isu umum yang dinilai penting. Jika dikaitkan dengan KPU, maka penentuan agenda yang tepat ditentukan oleh Ketua Komisioner KPU, upaya dalam membangun isu dengan penentu agenda dengan melakukan rapat, membahas hal yang dianggap penting dalam masyarakat. Mereka akan menyusun dan mempertimbangkan seberapa penting arti Pilkada dalam masyarakat. Contohnya, dengan melakukan pemilu yang sehat akan menghasilkan pemimpin yang hebat dan membangun suatu desa dengan jujur.
- c. Level kedua adalah menentukan bagian-bagian atau aspek-aspek dari isu umum tersebut yang dinilai penting. Mereka yang terlibat dalam penentuan agenda, akan menyusun aspek-aspek untuk mereka sebariskan melalui media yang telah mereka tentukan, seperti menggunakan media cetak, audio, reklame, ataupun poster.

Penentuan isu yang dianggap penting, contohnya golput bukan akhir dari segalanya, pentingnya mengikuti sosialisasi tata cara mencoblos, sosialisasi jangan salah pilih, dan tidak menerima suap dari calon Pilkada, karena hal itu memulai demokrasi yang mengajarkan pimpinan berkuasa karena hasil sogokan. Sehingga mereka yang memegang penentu agenda, akan memengaruhi agenda publik sesuai dengan agenda yang dianggap penting oleh penentu agenda. Sehingga perlu adanya agenda media dengan bersosialisasi melalui media untuk mempengaruhi agenda publik.

REFERENSI

- Achmadi dan Narkubo, 2004, *Metode Penelitian*. Jakarta Bumi aksara.
- Daniel S. Salossa, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang NO.32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005).
- Gleko Petrus, 2017. “*Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilukada*” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Malang. Vol.6.No.1.
- Goerge Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang sedang berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 15.
- Haryono, Dwi. 2016. “*Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015*” *Journal Administrative Reform*, Vol.4.No.2.
- Kpud-sumutprov.go.id>langkah, diakses pada 30 Maret 2018.
- Manik, Kamila Husni dkk. 2014 *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014*. Jakarta.
- Meloeng, J, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2013) hlm 134-135.
- Mz hollyson Rahmat 2015. *Pilkada*. Jakarta. Pilkada Serentak.
- Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supriyono Arif 2014. *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jakarta Selatan. Perludem.